

DAFTAR PUSTAKA

- Adhinata, B., & Marsitadewi, K. E. (2022). Upaya Penyelesaian Konflik Kepemilikan Pura dan Kuburan Antara Desa Adat Kemoning dan Desa Adat Budaga. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 6(2), 56-67.
- Ardeansari, R. S. (2022). *Konflik Batas Wilayah Antar Daerah (Studi di Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang)* (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD").
- Arifin, S. (2016). Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3), 439-460.
- Arifin, S. (2022). *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*. Sinar Grafika.
- Batubara, Harmen. (2013). Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Tahun 2013. Diakses <http://harmenbatubara.blogdetik.com/2013/11/27/penyelesaian-perselisihan-batas-daerah-tahun-2013>, pada 15 April 2023
- Chomzah, Ali Achmad. (2004). *Hukum Agraria (Pertanahan di Indonesia)*. Jakarta : Prestasi Pustakarya.
- Dewi, S. F., Hermayulis, H., Jahi, J. M., & Yulika, F. (2012). Border Conflict Areas in Indonesia (The Study on Boundary Conflict in West Sumatra). *International Journal on Social Science Economics & Ar*, 2(3), 11-15.
- Endi, Musa (2022). *Peran Dinas Perikanan Dan Kelautan Dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan Mina Jaya Gudang Lelang Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung*. Diploma Thesis, Uin Raden Intan Lampung.
- Hadiwijoyo, Suryo S. (2011) *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Hunt, M., & Metcalf, L. (1996). Ratio and inquiry on society's closed areas. *Educating the Democratic Mind* (Parker, W.). New York: State University of New York Press.
- Jaya, U. I., & Delmiati, S. (2022). Koordinasi Antara Kepolisian Dengan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Tapal Batas. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(2), 130-138.
- Kartasasmitha, Ginandjar. (1996) *Pembangunan Untuk Rakyat: Memaduka pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pusaka Cisendo.

- Kartika, T., Afriza, L., & Fajri, K. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 2(1), 11-24.
- Kusmanto, H. (2021). *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal*.
- Laritmas, S., & Tondo, S. (2021). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PADA SENGKETA TAPAL BATAS 6 DESA DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAN KABUPATEN HALMAERA BARAT DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 6(2), 156-172.
- Lighting, I. L. U. (2013). How To : How To : *Most, January*, 1–3.
- Manurung, S. H. R., & Sadad, A. (2017). *Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Miles, Matthew B & A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of management review*, 22(4), 853-886.
- Moloeng, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Mulyawan, Rahman (2016), *Masyarakat, Wilayah, Dan Pembangunan*. Bandung:UNPAD Press.
- Ndraha, Taliziddu. (2011). *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nisaa, K., & Hidayati, N. (2022). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lambang Sari. *Jurnal Sosial Sains*, 2(7), 779-786.
- Nururrohmah, Z., & Suhirman, (2016). Shared-power governance in managing common pool resources case study: collaborative planning to manage thematic parks in Bandung City, Indonesia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 227, 465-476.
- Patongloan, A. J., Salinding, M. B., SH, M., Basri, S. H., & Kn, M. (2019). Penyelesaian Sengketa Batas Antar Daerah. *Jurnal Akta Yudisia*, 4(1), 77-108.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. (2009). *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

- Putri, C. (2017). Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).
- Rahman, M. F., & Asikin, Z. (2020). Pola penyelesaian konflik batas wilayah antar Desa pasca program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) tahun 2019 di kabupaten lombok timur. *Jurnal education and development*, 8(2), 344-344.
- Rahman, M. F., & Asikin, Z. (2020). Pola penyelesaian konflik batas wilayah antar Desa pasca program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) tahun 2019 di kabupaten lombok timur. *Jurnal education and development*, 8(2), 344-344.
- Rahmawati. (2021). KONFLIK BATAS DESA ANTARA DESA PETANI DENGAN DESA SIMPANG PADANG KABUPATEN BENGKALIS. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 8 (4),1-14
- Rejekiningsih, T. (2016). Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di indonesia). *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 298-325.
- Rindi, T. A. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Sandi, F. (2020). Perang Sino-India (1962): Polemik Sengketa Perbatasan China-India dalam Sudut Pandang Konstruktivisme. Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Airlangga, 1.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2015). *Teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. (2011). Pengantar Sosiologi. Jakarta : Kencana.
- Siagian, Sondang. (2009). *Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Silviana, A. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan pada Masyarakat Tani (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang).
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2013) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sudiq, R. D., & Yustitianty, L. (2022). INTERVENSI RUSIA TERHADAP UKRAINA PADA TAHUN 2022 SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 101-117.
- Sugiyono. 2012. *Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.

- Suharto, Edi. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumaryadi, Nyoman. (2010). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A. I., & Weningsih, S. (2019). Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Soedirman*, 2(2), 40-60.
- Tambunan, R. T. J., Marcello, M., Yohanes, R., Agustina, S., Haloho, K. S. D., Nengsi, F., ... & Yanti, R. A. (2023). Tinjauan Terhadap Beberapa Kasus Kejahatan Internasional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1416-1429.
- Tropiano, L., & McNutt, D. (1995). How to implement ISDN. *Byte*, 20(4).
- Turmudi, H. (2021). STATUS KEPEGAWAIAN PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. *Res Judicata*, 4(1), 61-82.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 99-103.
- Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Publika*, 323-334.
- Zubaedi. (2007) *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : A Ruzz Media.